

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pembangunan dan Pelayanan Publik di Kota Solok ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah belum tercapai dengan maksimal, dan perlu adanya kebijakan-kebijakan yang dapat diambil untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di Kota Solok harus berbasis keberlanjutan, yaitu tidak hanya untuk kebutuhan saat ini tetapi juga untuk generasi mendatang. Pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan sektor ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah harus berupaya untuk mengatasi tantangan seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, dan kesenjangan ekonomi. Dengan strategi yang tepat, pembangunan di Kota Solok dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berdampak luas bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam aspek pelayanan publik, pemerintah daerah berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan, tetapi masih terdapat kendala dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah perlu meningkatkan PAD agar program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, diperlukan sinergi antara

pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2. Tantangan dan Peluang dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Solok ditinjau dari aspek pemenuhan Hak Kesejahteraan Masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Kota Solok menghadapi berbagai tantangan yang perlu diselesaikan melalui strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, optimalisasi tata kelola pemerintahan, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi langkah kunci dalam memastikan bahwa hak kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan dari semua pihak, Kota Solok dapat lebih maju dalam mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya. Pemenuhan hak kesejahteraan masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketergantungan pada dana transfer pusat, keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan implementasi kebijakan daerah. Namun, di sisi lain, Kota Solok memiliki peluang dan potensi besar dalam pengembangan sektor ekonomi lokal, pendidikan, kesehatan termasuk pemberdayaan UMKM, sektor pertanian, serta pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

B. Saran

Sesuai dengan pembahasan yang telah penulis kaji pada bab sebelumnya,

saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan secara merata, terutama di wilayah pinggiran yang masih mengalami ketertinggalan dibandingkan pusat kota. Alokasi anggaran harus lebih proporsional agar fasilitas umum seperti jalan, sekolah, dan layanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan harus ditingkatkan agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan lokal dan mampu menciptakan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama. Penerapan teknologi informasi melalui sistem digitalisasi layanan dapat mempercepat birokrasi, mengurangi praktik korupsi, dan meningkatkan kepuasan masyarakat.
2. Dalam menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Solok terkait pemenuhan hak kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Solok perlu mengoptimalkan pemanfaatan anggaran daerah secara transparan dan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam sektor kesehatan, pemerintah dapat membangun lebih banyak pusat layanan kesehatan primer seperti puskesmas keliling untuk menjangkau daerah terpencil, serta meningkatkan kapasitas tenaga medis melalui pelatihan berkala. Sementara dalam bidang pendidikan, investasi dalam pengembangan sarana dan prasarana sekolah dan pelatihan guru prioritas utama guna meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Dalam

menghadapi keterbatasan lapangan kerja, pemerintah perlu mengembangkan program pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri dan mendorong inovasi di sektor ekonomi kreatif serta UMKM. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah juga perlu diperkuat dengan meningkatkan keterbukaan informasi serta transparansi dalam pengambilan keputusan.



